

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran tentang opini BPK, Peraturan Perundang-Undangan, Sumber Daya Manusia, teknologi informasi dan pengelolaan Dana BOS adalah **Baik**.
2. Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang. Artinya apabila peraturan perundang-undangan dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dengan benar maka pengelolaan dana BOS akan semakin baik.
3. Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang. Artinya apabila kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan menjadi baik maka pengelolaan dana BOS akan semakin baik.
4. Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan Dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang. Artinya apabila penguasaan teknologi semakin baik oleh pengelola dana BOS, maka pengelolaan dana BOS akan semakin baik.
5. Peraturan Perundang-Undangan berpengaruh signifikan terhadap opini BPK perwakilan NTT. Artinya apabila peraturan perundang-undangan

dapat dipahami dengan baik dan diterapkan dengan benar maka pelaporan yang dibuat akan mendapat opini BPK dengan predikat WTP.

6. Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap opini BPK
Artinya apabila kualitas sumber daya manusia yang mengelola dana BOS di sekolah dapat ditingkatkan menjadi baik maka pelaporan yang dibuat dapat memperoleh opini BPK dengan predikat WTP
7. Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap opini BPK
Artinya apabila pengelolaan dana BOS di sekolah dapat menguasai aplikasi teknologi dengan baik, maka pelaporan yang dibuat dapat memperoleh opini BPK dengan predikat WTP
8. Pengelolaan Dana BOS berpengaruh signifikan terhadap Opini BPK perwakilan NTT. Artinya apabila pengelolaan dana BOS di sekolah dapat dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang ada, maka pelaporan yang dibuat dapat memperoleh opini BPK dengan predikat WTP
9. Pengelolaan dana BOS memediasi pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK. Artinya pengelolaan dana BOS dapat memediasi atau memperkuat pengaruh peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK, dibanding pengaruh langsung peraturan perundang-undangan terhadap opini BPK
10. Pengelolaan dana BOS memediasi pengaruh sumber daya manusia terhadap opini BPK. Artinya pengelolaan dana BOS dapat memediasi

secara penuh atau memperkuat pengaruh sumber daya manusia terhadap opini BPK, dibanding pengaruh langsung sumber daya manusia terhadap opini BPK

11. Pengelolaan dana BOS tidak memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap opini BPK. Artinya pengelolaan dana BOS tidak dapat memediasi secara penuh pengaruh teknologi informasi terhadap opini BPK, dibanding pengaruh langsung teknologi informasi terhadap opini BPK.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan kepada manajemen beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan Dana BOS.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya pada sikap dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar Negeri di kota Kupang.
3. Meningkatkan kemampuan teknologi informasi kerja khususnya berkaitan dengan pengadaan perangkat lunak yang dapat membantu bendahara sekolah dalam proses dan pengelolaan Dana BOS.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan variabel maupun indikator yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Auditing (Pemeriksaan Akuntansi) oleh Kantor Akuntan Publik Jilid I*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Arens, A. A. Elder dan Beasley, M. S. 2008. *Auditing and Assurance Service : An Intergrated Approach*. Ninth Edition. Prectice Hall, New Jersey
- Bungin, Burhan. 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Depdiknas. 2010. *Buku Panduan Operasional Sekolah, untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu*. Jakarta: Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Ghozali, Imam. 2008. *Structural Equation Model Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi Ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hariningsih, S.P. 2005. *Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Sayuti. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Non Sekuler*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasibuan, Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulyadi, 2011. *Auditing*, edisi 5 cetakan pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Permendikbud. 2017. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah* ermendikbud RI Nomor 26 tahun 2017. Jakarta, Dirjen Kemenhumham.
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Lina Miftahul. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal.2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rivai, Veithzal dan Sagala, Ella Jauvani. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sholihin, Mahfud dan Ratmono, Dwi. 2013. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 Untuk Hubungan Non Linier Dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung : Alfabeta
- Supriyanto, A. 2005. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Salemba Infotek.
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yamin dan Kurniawan, 2009: 214). Yamin,Sofyan dan Kurniawan, Heri. 2009. *Structural Equation Modeling*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, Burhauddin. 2015.*Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Cetakan 1. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal dan Tesis

- Alfiani, A. N., Rahayu, S., dan Nurbaiti, A. 2017. *Jumlah Audit Atas Sistem Pengendalian Intern Dan Jumlah Temuan Atas Kepatuhan Terhadap Opini LKPD Pemerintah Kota/Kabupaten Di Jawa Barat*. Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK),Vol. 9, No. 1, 12-19.
- Amaliasari. 2011. *Kajian Terhadap Penggunaan Dana Bos Oleh Beberapa Sekolah Dasar Di Jakarta Timur Tahun 2010 (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Negeri Kotamadya Jakarta Timur)*. Tesis. Jakarta. Universitas Indonesia.
- RM Syah Arief Atmaja W., Agung Nur Probohudono. 2015. *Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret,Pusat Studi Transparansi Publik dan Anti Korupsi UnivesitasSebelas Maret, Volume 1 Nomor 1 – November 2015.
- Rosadi, Samsul., Siyamto, Yudi., Aisyiah, Helti. 2017. *Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah Dan Ukuran Daerah Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Di Pulau Jawa Tahun 2013. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 02, 2017.

Safitri, N.L.K.S.A., dan Darsono. 2015. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 5, No. 1, 1-12.

Peraturan-Peraturan

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Reguler.

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan (Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 06/K/IXIII.2/6/2008).

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2)

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara